



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas Elektronik	Kalteng Pos	Borneo News
	Palangka Post	Tabengan

✓ PUPR Baru Kembalikan Kelebihan Pembayaran 3 Proyek

PALANGKA RAYA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Barito Utara (Barut) M Iman Topik mengatakan, pihaknya sudah membayar atau mengembalikan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran 3 proyek, yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng.



M Iman Topik

Rinciannya, pembangunan KTA yang dilaksanakan CV Ar Rahman Rp39.234.541,41, kelebihan pembayaran pada pekerjaan area wisata pohon, gazebo dan taman sebesar Rp30.830.473,21 yang dilaksanakan CV Borneo Inti Berkarya, dan kelebihan pembayaran pada pekerjaan assesoris taman sebe-

sar Rp68.891.904,41 yang dilaksanakan CV Berkah Anugrah Rejeki Semesta.

"Terkait rekomendasi BPK terhadap tiga kegiatan di atas, *alhamdulillah* sudah *clear* diselesaikan pengembalian ke Kas Daerah melalui Bank Kalteng. Semua dikembalikan tanggal 31 Juli 2024,"

kata M Topik kepada *Tabengan*, Kamis (1/8).

Dijelaskan, beberapa item kegiatan yang mengalami perubahan bentuk, telah dilakukan penanganan dan perbaikan, mengingat perbaikan tersebut berada dalam waktu pemeliharaan.

Diberitakan sebelumnya, BPK RI Perwakilan Kalteng telah ke Halaman A4

PUPR Barut Kembalikan

● Sambungan Hal A1

memeriksa sejumlah item pekerjaan yang terselenggara oleh PUPR Barut. Disebutkan, terdapat sejumlah temuan pada tiga item pekerjaan. “Tiga paket pekerjaan lainnya ditemukan permasalahan kekurangan volume

dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak senilai Rp115,96 juta,” ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M Ali Asyhar dalam suratnya kepada *Tabengan*.

Temuan BPK RI tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Barut, 2 Juli 2024 lalu.

BPK RI telah memberikan rekomendasi kepada Bupati Barut agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi dengan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp115,96 juta. mel